

**PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA MATTANETE BUA
KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**
*FARMERS EMPOWERMENT IN MATTANETE BUA VILLAGE, PALAKKA
DISTRICT, BONE REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE*

Muhammad Idris Patarai

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: idrispattarai@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan saat ini gencar dilakukan oleh Pemerintah. Dalam artikel ini penulis memfokuskan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keahlian petani dalam mengelola produksi hasil pertaniannya. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati dan dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua telah terlaksana dengan baik namun masih didapati beberapa kekurangan seperti regulasi yang dilakukan Pemerintah belum sepenuhnya optimal, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, dan partisipasi masyarakat petani masih sangat rendah terkait sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua. Saran dari penulis adalah masyarakat petani di Desa Mattanete Bua harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait baik Pemerintah maupun masyarakat lainnya, inovasi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah agar petani dapat berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan, pengaturan lahan pertanian dan pemukiman serta sarana prasarana yang dibutuhkan oleh petani perlu diperhatikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Petani Desa Mattanete Bua

ABSTRACT

Empowerment is currently being intensively carried out by the Government. In this article, the author focuses on empowering farmers with the aim of developing and optimizing farmers' skills in managing their agricultural production. The author uses a qualitative descriptive method with inductive research. This method describes aspects related to the observed and studied focus. The data collection methods used were observation, interviews, and document studies. The results showed that the efforts to empower farmers in Mattanete Bua Village had been carried out well but there were still some shortcomings such as the regulations carried out by the Government were not yet fully optimal, the quality of human resources was inadequate, and the participation of the farming community was still very low related to socialization, counseling, agricultural education and training by the Mattanete Bua Village Government. Suggestions from the author are that the farming community in Mattanete Bua Village should get attention from all related parties, both the Government and other communities, the empowerment innovations carried out by the Government so that farmers can actively participate in the empowerment program implemented, the regulation of agricultural land and settlements as well as infrastructure that needed by farmers need to be considered.

Keywords: Empowerment, Mattanete Bua Village Farmers

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kata pemberdayaan menjadi sebuah konsep yang menarik perhatian utama oleh pemimpin dan organisasi di dunia. Pemimpin dituntut untuk dapat memberdayakan anggotanya, sehingga tidak hanya pemimpinlah yang dapat menjadi seorang pemimpin namun anggotanya juga dapat menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri yang nantinya akan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut menjadi menjadi sesuatu yang menarik untuk diungkapkan. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan tujuan mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, asas otonomi oleh Pemerintah Daerah ditangani secara fokus terutama pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan antar daerah dan peran masyarakat dalam mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dimulai dengan pemberian ruang dan kesempatan yang cukup untuk menampung aspirasi masyarakatnya yang dianggap mempunyai potensi dalam membangun daerah. Terciptanya kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dalam aspek membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan diharapkan sebagai faktor untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar selalu dapat mandiri, serta tidak selalu bergantung pada Pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dapat ditempuh dengan peningkatan kemampuan dan keahlian SDM dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan sumberdaya. Seperti diketahui

Indonesia merupakan negara agraris dengan ekonomi yang kebanyakan mengendalikan sektor pertaniannya. Kesempatan seperti ini dianggap sebagai hal serius, sebab kebanyakan masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sangat bergantung pada hasil pertanian (mata pencaharian petani).

Pemberdayaan masyarakat muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan Black Panther memobilisasi politik di USA pada tahun 1960 dan pada pertengahan tahun 80- an kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*". Istilah pemberdayaan di Indonesia mulai populer pada tahun 1998 dan terus berkembang pada era reformasi.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa "*empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on*" (Ife, 1995). Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Payne (1997:268) menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan

meraka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang digunakan manusia untuk memperoleh bahan pangan, bahan baku produksi, atau energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk pertanian yaitu budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), walaupun masih terdapat pula pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti ekstraksi atau eksploitasi.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting peranannya dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemerintah sudah berkomitmen melaksanakan program revolusi hijau dengan meningkatkan produksi disektor pertanian sebagai tumpuan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan iklim tropis memberikan keuntungan untuk mengembangkan sektor pertanian dengan mudah.

Pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pembiayaan dan pendanaan petani, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Pemberdayaan didasarkan pada kondisi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Petani memiliki kebutuhan yang berbeda dengan petani lainnya. Dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan pertanian.

Partisipasi para petani dalam pelaksanaan program pemberdayaan tidak bisa dipisahkan. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk- beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 17 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat

menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani yang bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dan upaya pembinaan bagi petani. Petani diberi ruang dan perlindungan untuk menghasilkan produksi pertanian dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana, penjaminan modal kembali apabila gagal panen, dan resiko harga dari Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjelaskan bahwa pertanian di Sulawesi Selatan memiliki keunikan tersendiri dan perlu adanya dasar hukum yang

mengatur dan melindungi sektor pertanian. Karena berdasarkan data lahan pertanian pangan di Sulawesi Selatan cenderung semakin berkurang dikarenakan alih fungsi yang mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Pemberdayaan dan kesejahteraan para petani juga masih sangat kurang perhatiannya oleh Pemerintah.

Sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan sektor yang paling dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data tahun 2004 sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yaitu 56,94%. Sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan pilar utama penopang kesediaan pangan baik untuk daerah maupun untuk negara. Ketersediaan hasil pertanian yang melimpah membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari delapan Provinsi yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak ± 174 km dari Kota Makassar Ibu kotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4°13"- 5°6" Lintang Selatan dan antara 119°42"-120° 40" Bujur Timur. Kabupaten Bone adalah kabupaten atau kotamadya dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Makassar.

Wilayah administrasi Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang diperinci menjadi 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa dan 44 (empat puluh empat) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.098 (seribu Sembilan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bone yaitu sebesar 738.515. (BPS Kab. Bone 2016)

Sistem pertanian pada masyarakat yang Kabupaten Bone yang dominan pertanian sangatlah vital artinya bagi kehidupan mereka. Sistem pertanian bagi mereka adalah merupakan cara bagaimana mereka bisa hidup. Terlebih untuk masyarakat yang masih bersahaja, yang kehidupannya tergantung sepenuhnya pada pertanian. Maka bagi masyarakat desa semacam itu, sistem pertanian adalah identik dengan sistem perekonomian mereka, yakni bila ekonomi diartikan sebagai cara “pemuhan keperluan jasmani manusia” sejauh ini digeneralisasi secara umum, desa-desa di Indonesia umumnya adalah pertanian.

Kecamatan Palakka merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Palakka berbatasan dengan beberapa kecamatan lain yaitu Kecamatan Awangpone (utara), Kecamatan Tanete Riattang Barat (timur), Kecamatan Barebbo (selatan), Kecamatan Tellu Siattinge dan Ulaweng (barat). Jumlah penduduk di Kecamatan Palakka terbilang cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Bone yaitu sebesar 21.659 jiwa (data BPS tahun 2017). Terdapat 15 desa dengan potensi sumberdaya yang berbeda-beda.

Kecamatan Palakka merupakan daerah dengan keadaan geologis yang sangat mendukung berlangsungnya kegiatan pertanian dan perkebunan. Letak geografis yang sangat strategis dekat dengan ibu kota kabupaten Bone dapat mempermudah akses distribusi dan penjualan hasil pertanian yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang tersedia sangat membantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertanian mereka.

Salah satu desa di Kecamatan Palakka yaitu Desa Mattanete Bua yang menjadi daerah dengan hasil pertanian yang cukup besar setiap tahunnya. Mattanete Bua pada zaman Pra kemerdekaan RI merupakan ronde dari wilayah kerajaan Bone. Yang telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan awal mulanya dipimpin oleh “Pati Tanete”

selanjutnya dipimpin oleh Mado selanjutnya dipimpin oleh kepala desa Pada tahun 1960 Tanete Buang Baru dikuatkan sebagai Desa dan Maduri merupakan wilayah Tanete buang dan pada tahun 1971 Tanete Buang di ubah namanya menjadi “Desa Mattanete Bua” yang singkatan dari Maduri dan Tanete buang.

Letaknya yang dekat dengan daerah perkotaan menjadi suatu keunggulan tersendiri yaitu 10 km dari ibu kota Kabupaten Bone. Desa Mattanete Bua berdekatan dengan beberapa Desa Lainnya yaitu Desa Tirong Kecamatan Palakka (Utara), Desa Maduri Kecamatan Barebbo (Timur), Desa Wollangi Kecamatan Ponre (Selatan), dan Desa Cinddong Kecamatan Ponre (Barat). Luas wilayah Desa Mattanete Bua sebesar 6 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.440 jiwa (Data Desa 2020). Memiliki 4 dusun yaitu dusun Ta’, Dusun Tanete Boang, Dusun Tanete Lamoko, Dusun Sanrangeng.

Desa Mattanete Bua memiliki potensi pertanian yang sangat besar dibandingkan dengan desa lainnya seperti jagung, cengkeh, padi, dan cokelat dengan rata-rata hasil panen per tahun sebesar 7-10 ton. Hal ini memungkinkan ketersediaan hasil pertanian bagi masyarakat kabupaten Bone khususnya masyarakat Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka. Pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian hasil pertanian oleh masyarakat dipermudah dengan adanya sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua. Namun akses jalan di Desa Mattanete Bua masih sangat kurang memadai. Untuk jalan tani masih berupa jalan tanah dan bebatuan yang belum ada perbaikan dan perhatian dari pemerintah setempat. Hal ini menyulitkan petani dalam bekerja dan melakukan produksi hasil pertanian. Sarana dan prasarana yang cukup memadai memberikan kemudahan kepada para petani untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil pertaniannya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terpenting dalam peningkatan suatu

daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa Mattanete Bua bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian karena salah satu sektor yang mampu menunjang perekonomian masyarakat. Menurunnya jumlah produksi pertanian di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi masalah dalam kajian ini. Estimasi luas panen hasil pengamatan KSA dari Januari 2019 hingga Desember 2019 di Bone sebesar 169,4 ribu hektar menurun 44,92 ribu hektar (21%) dari luas panen tahun sebelumnya. Sementara itu, estimasi produksi padi di Bone dari Januari hingga Desember 2019 sebesar 774,34 ribu ton gabah kering giling (GKG). Nilai ini menurun sekitar 231,17 ribu hektar (23%). Berdasarkan identifikasi dan analisis tersebut maka masalah yang dijadikan sebagai fokus dari kajian dapat dirumuskan mengenai bagaimana optimalisasi dan implementasi pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua, faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani dan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan terutama data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan para petani dan perangkat desa di Desa Mattanete Bua. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan melaksanakan *focus group discussion* dengan semua stakeholder di Desa Mattanete Bua. Sedangkan Data sekunder diambil dari dokumen-dokumen pemerintah desa, meliputi: rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Adapula data tersier yang diambil dari internet. Beberapa

artikel dan ditelusuri dengan menggunakan internet. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan secara terperinci, melakukan sintesis atas data-data, menyusun kedalam pola, memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Mattanete Bua

Mattanete Bua pada zaman Pra kemerdekaan RI merupakan ronde dari wilayah kerajaan Bone. Yang telah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan awal mulanya dipimpin oleh "PatiTanete". Selanjutnya dipimpin oleh Mado selanjutnya dipimpin oleh kepala desa. Pada tahun 1960 Tanete Buang Baru dikuatkan sebagai Desa dan Maduri merupakan wilayah Tanete buang dan pada tahun 1971 Tanete Buang di ubah namanya menjadi "Desa Mattanete Bua" yang singkata dari Maduri dan Tanete buang.

Secara topografi ketinggian lokasi dari permukaan air sekitar 100-300meter diatas permukaan laut sehingga beriklim panas/lembab, dengan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landau, miring dan terjal. Struktur tanahnya cenderung labil dan terletak jauh dari pegunungan dan tepi pantai. Desa Mattanete Bua memiliki luas wilayah 6 km² atau 1,05% dari total luas Kabupaten Bone. Jarak tempuh Desa Mattanete Bua dengan Ibukota Kabupaten Bone adalah 10 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Secara administratif, Desa Mattanete Bua terletak di wilayah Kabupaten Bone

dengan posisi dibatasi oleh wilayah tetangga sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tirong
Kecamatan Palakka
- b. Sebelah Barat : Desa Cinddong
Kecamatan Ponre
- c. Sebelah Selatan : Desa Wollangi
Kecamatan Ponre
- d. Sebelah Timur : Desa Maduri
Kecamatan Palakka

Berdasarkan data Administrasi Desa Mattanete Bua tahun 2020, jumlah penduduk Desa Mattanete Bua adalah terdiri dari 485 KK, dengan jumlah penduduk total 1440 jiwa, dengan rincian laki-laki 706 jiwa dan perempuan 734 jiwa. sekitar 821 atau hampir 50% penduduk usia produktif pada usia 18-40 tahun. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Dari jumlah 485 KK diatas, hampir 40% KK di Desa Mattanete Bua adalah keluarga miskin, dan sisanya merupakan termasuk golongan keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Wilayah Desa Mattanete Bua terdiri dari 4 dusun dengan tujuan memaksimalkan fungsi koordinasiterhadap pelayanan masyarakat di Desa Mattanete Bua. Setiap Dusun memiliki kontur dan luas wilayah yang berbeda-beda meskipun dalam satu kesatuan Desa.

Untuk pertaniannya, lahan pertanian Desa Mattanete Bua semakin tahun semakin menurun. Terbukti lahan pertanian Desa Mattanete Bua setahun terakhir berkurang. Banyak potensi pertanian yang dimiliki Desa Mattanete Bua namun banyak masalah yang dihadapi. namun dari tingkat produktifitas, lahan pertanian tersebut masih sangat produktif dan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Mattanete Bua maupun masyarakat Desa lainnya.

Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan

hidup bagi para petani. Ada dua tujuan akhir yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan petani di antaranya:

- a. masyarakat tani akan memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dari sebelumnya dengan kesejahteraan yang lebih baik.
- b. masyarakat tani memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola pertanian guna mencapai peningkatan produksi.

Dalam upaya pemberdayaan, pemerintah Desa Mattanete Bua harus melalui beberapa proses untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan petani. Dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan yakni seperti melakukan pendekatan, penguatan kepada masyarakat, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal apabila masyarakatnya sudah dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Kebanyakan petani di Desa Mattanete Bua adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama dengan pengetahuan yang minim, terutama dalam hal teknologi. Dalam memberdayakan petani, selain tujuan dan proses ada cara yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua seperti:

- a. Membangun Kerjasama Petani
- b. Membangun komunikasi
- c. Pemecahan masalah sebagai proses belajar

Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya desentralisasi, Pemerintah daerah menjadi lebih terfokus dalam mengurus urusan rumah tangganya. Dengan adanya campur tangan dari pemerintah daerah maka

pemberdayaan bagi petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone menjadi lebih intensif, serta mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bone. Peran dan kewenangan Desa yang sangat luas dapat diambil oleh Kepala Desa untuk membuat kebijakan atau terobosan baru untuk kemajuan pertanian di Desa Mattanete Bua.

2. Mempunyai lahan yang subur

Wilayah pertanian Kecamatan Palakka juga termasuk wilayah yang sangat subur, apabila lahan pertaniannya diolah dengan baik dan benar (mulai dari masa tanam sampai masa pasca panen) maka akan menghasilkan jumlah produksi yang banyak. Selain itu lahan pertaniannya bisa dimaksimalkan jika dalam setahun para petani mengelola lahan pertaniannya dua kali dalam setahun (setiap enam bulan sekali) sehingga menghasilkan jumlah produksi padi yang jauh lebih banyak.

3. Modernisasi alat tani

Alat tani seperti cangkul, tractor, alat semprot hama, penggiling padi, pompa air dan lain sebagainya. Para petani di Desa Mattanete Bua mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Palakka dalam modernisasi alat pertanian mereka. Yang sebelumnya dalam mengolah tanah sawah masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, saat ini sudah memakai traktor mesin diesel yang cukup canggih. Tidak hanya itu, dalam menggiling padi yang sebelumnya para petani harus memisahkan padi secara konvensional untuk saat ini sudah menggunakan mesin penggiling padi yang disediakan Desa untuk seluruh petani.

4. Sarana prasarana yang lengkap

Desa Mattanete Bua yang cukup dekat dengan Ibukota Kabupaten Bone yaitu 10 km memberikan keuntungan tersendiri

dalam percepatan perkembangan pertanian. Pendistribusian peralatan pertanian, bibit, dan pupuk sangat mudah karena akses yang sangat strategis. Sarana dan prasarana yang cukup lengkap memudahkan petani dalam menjalankan produksi pertaniannya.

Faktor Penghambat

1. Regulasi

Permainan harga jual hasil produksi pertanian memang sudah cukup lama terjadi di lingkungan para petani. Mereka terkadang mewajarkan hal tersebut karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah telah banyak menyaksikan keluhan, penderitaan, dan jeritan para petani terkait harga yang sangat tidak layak bagi mereka. Dengan usaha dan proses yang tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh membuat petani terkadang cukup geram. Para petani di Desa Mattanete Bua mengharapkan ketegasan dan kejelasan terkait implementasi dari regulasi tersebut sehingga permasalahan ini tidak terus berlanjut.

2. Sumber Daya Manusia

Pemberian pendidikan dan Latihan bagi kelompok tani sangat diperlukan dalam pengembangan potensi para petani. Hal ini dilakukan pemerintah Desa Mattanete Bua dengan menyediakan balai pertanian dan tenaga pendidik dan penyuluh yang berkompeten dalam mengajar para petani. Pemerintah Desa juga tidak menutup bagi para mahasiswa dan pelajar untuk memberikan sumbangsih dan implementasi atas ilmu dari hasil studinya kepada masyarakat tani Desa Mattanete Bua. Saling belajar dan memberikan masukan terkait teknologi pertanian, alat yang saat ini sudah cukup canggih untuk digunakan sebagai alat tani, dan juga fakta di lapangan terkait pertanian yang sesungguhnya yang diberikan oleh para petani kepada pelajar tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti program pemerintah seperti pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Kebanyakan menganggap program seperti pelatihan dan penyuluhan tidak memberi dampak apapun. Artinya, partisipasi masyarakat itu sendiri untuk diberdayakan masih minim dan harus membutuhkan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah untuk program kedepannya.

Upaya Mengatasi Hambatan

1. Pemerintah tegas terhadap regulasi

Ada banyak regulasi yang sudah seharusnya pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Contohnya dengan pemanfaatan model satelit yang dimiliki oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pemetaan sawah bisa dilakukan, mana yang bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, mana yang sudah menjadi pemukiman. Dengan demikian tidak ada lagi investor yang mencoba membangun lahan pemukiman di sekitaran lahan pertanian. Selanjutnya regulasi mengenai ketentuan tentang harga jual- beli hasil pertanian, apabila ada kelompok/individu tengkulak yang tidak mematuhi regulasi yang telah pemerintah daerah tetapkan, maka pemerintah daerah harus tegas memberikan evaluasi dan sanksi kepada pihak kelompok/individu tersebut

2. Pembinaan Kelompok Tani

Dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, pembinaan kelompok tani menjadi solusi yang dilakukan Pemerintah Desa Mattanete Bua dalam mengatasi hambatan yang dihadapi para petani. Berdasarkan wawancara enumerator kepada sekretaris desa mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat desa hampir 90% adalah petani, termasuk babinsa juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani. Pembinaan terhadap pertanian dilakukan melalui P3A (Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk mencari hal apa saja yang menjadi permasalahan dan perlu dibenahi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian”

Dengan adanya pembinaan kelompok tani diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi dalam melahirkan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan pertanian dan pendapatannya.

3. Subsidi Pemerintah

Selama ini pemerintah Desa Mattanete Bua sudah memberikan pupuk dan pestisida bersubsidi dan dampaknya bagi petani cukup besar karena merasa diringankan meskipun belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Untuk itu pemerintah kedepannya harus lebih cermat dan teliti dalam memperhitungkan jumlah pupuk dan pestisida yang hendak disubsidikan oleh Pemerintah Desa Mattanete Bua agar petani semakin nyaman dan bersemangat lagi dalam mengelola lahan pertaniannya karena ada jaminan dan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani.

Tidak hanya subsidi dalam pemberian pupuk dan pestisida saja. Pemerintah Desa Mattanete Bua telah memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian yang bisa digunakan untuk seluruh petani. Hasil wawancara kepada sekretaris desa Mattanete Bua mengatakan: “Bantuan pertanian dari pemerintah yaitu traktor, semprot racun hama, mesin giling padi, dan mesin pompa air untuk irigasi sawah”. Hal ini sangat membantu para petani karena mulai saat ini para petani tidak lagi menggiling padi di kecamatan atau di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Dengan adanya alat-alat tersebut para petani dapat dengan mudah mengolah

hasil pertaniannya dengan cepat dan biaya yang cukup murah karena hanya memberikan biaya untuk perawatan alat saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam upaya pemberdayaan, pemerintah Desa Mattanete Bua harus melalui beberapa proses untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan petani seperti melakukan pendekatan, penguatan kepada masyarakat, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, (2) Membangun kerjasama petani, membangun komunikasi yang baik antara petani, petani dengan penyuluh maupun petani dengan pemerintah, dan pemecahan masalah sebagai proses belajar merupakan cara yang tepat dalam pemberdayaan petani sehingga tujuan pembangunan pertanian Desa Mattanete Bua dapat tercapai, (3) Pemberdayaan petani di Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih terjadinya penurunan hasil produksi panen setiap tahunnya, (4) Pemerintah perlu memperhatikan, mempertahankan dan mengoptimalkan keunggulan dari pelaksanaan pemberdayaan petani seperti: kewenangan yang diberikan pemerintah daerah, kondisi geologis Desa Mattanete Bua yang subur, peralatan tani yang cukup modern, dan sarana prasarana yang lengkap untuk seluruh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Amanah, S., & Narni, F. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Aminah. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama
- Irene, S. (2019). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Jamasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika
- Lisdayanti. (2017). *Peran Sektor Pertanian Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bone*. Repositori UIN Alauddin
- Mulyadi. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Muslim, S. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Narbuko, C. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, S., & Muhammad, T. (2019). *Hukum Untuk Petani: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi*. Klaten: Lakeisha.
- Priyono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1999). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Purba, B. (2020). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru press.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Tawai, A. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: Literacy Institute.
- Wahab, A. (2008). *Analisis Ekspor Komoditi Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap*

- Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan. *Investmen, Eksport, Economic Growth, Employment Journal*, 5, 2-7
- Ife.J.W. (1995). *Community development: Creating community alternatives- vision, analysis and practice*. Queensland: Longman Australia
- Payne.K. (1997). Patient Empowerment in Clinical Genetics Services. *Journal Of Helath Psychology*, 13 (7).
- Conyers, D (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:UGM Press.
- Irene. A. D. (2009). *Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Irene. A.D. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.